PENGARUH E-GOVERNMENT, KAPABILITAS APIP DAN PERSENTASI PENYELESAIAN TINDAK LANJUT TERHADAP OPINI AUDIT LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA

INDRIYANI WULANDARI
BANDI (bandi.ssm@gmail.com)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret

ABSTRACT

Audit Opinion BPK is the result of the audit process in the form of a statement that can be a picture of the quality of financial statements of the government, so that it becomes a reference for the central government in the finance ministries in assessing performance achievement of local government in particular to provide rewards and punishments related to public financial management. In connection with these problems, this thesis aims to obtain empirical evidence about the influence of the existence of the implementation of E-Government, APIP capability, and the percentage of completion of the Follow-up BPK BPK audit opinion. The analysis used in this research is multiple regression analysis using the method of research is purposive sampling. This study uses secondary data IHPS BPK 2015, the data IACM 2013, the data Peggi Kemenkominfo RI 2016. Researchers analyzed 228 local government composed of local government districts and cities. The results showed that the existence of e-government implementation and follow-up Completion Percentage BPK significant impact positively on BPK audit opinion, while APIP capability does not have a significant influence on the BPK audit opinion. APIP is not influential capability to audit opinion because most local governments in Indonesia APIP its capability level remained at level 1 (Initial) so it has not been able to support the implementation of effective governance. Applications of this research in the future it is suggested that the local government, Inspectorate (APIP area), BPK RI to cooperate in creating a better audit opinion that WTP opinion on the financial statements.

Keywords: E-Government, capabilities, Percentage Follow-Up, Audit Opinion

Opini audit BPK merupakan hasil dari proses audit dalam bentuk pernyataan yang dapat menjadi gambaran kualitas laporan keuangan pemerintah, sehingga menjadi acuan bagi pemerintah pusat di Kementerian Keuangan di pencapaian kinerja menilai dari pemerintah daerah khususnya untuk memberikan penghargaan dan hukuman yang terkait dengan pengelolaan keuangan publik, sehubungan dengan masalah ini, tesis ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh keberadaan pelaksanaan E-Government, kemampuan APIP, dan persentase penyelesaian BPK BPK opini audit Follow-up. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda dengan menggunakan metode penelitian adalah purposive sampling. Penelitian ini menggunakan data sekunder IHPS BPK tahun 2015, data IACM 2013, data Peggi Kemenkominfo RI 2016. Peneliti menganalisis 228 pemerintah daerah yang terdiri dari pemerintah daerah kabupaten dan kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan implementasi e-government dan tindak lanjut Penyelesaian Persentase BPK dampak signifikan positif pada opini audit BPK, sementara kemampuan APIP tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap opini audit BPK. APIP tidak kemampuan berpengaruh untuk mengaudit opini karena sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia APIP tingkat kemampuan tetap pada tingkat 1 (Initial) sehingga belum mampu mendukung pelaksanaan pemerintahan yang efektif. Aplikasi dari penelitian ini di masa depan disarankan agar pemerintah daerah, Inspektorat (APIP area), BPK RI untuk bekerja sama dalam menciptakan opini audit yang lebih baik bahwa pendapat WTP terhadap laporan keuangan.

Kata kunci: E-Government, kemampuan, Persentase Follow-Up, Opini Audit

PENDAHULUAN

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23

tahun 2014 tentang pemerintah daerah memberikan perubahan sekaligus tuntutan

terkait pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good governance and Clean Government*). Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good governance*) pemerintah berupaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Untuk mewujudkan *Good governance* terdapat tiga elemen dasar yang saling terkait antara satu dengan yang lain yaitu *accountability*, *participation*, *transparency* (Osborne dan Geabler 1992; LAN dan BPKP 2000).

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, menegaskan bahwa keuangan daerah harus dikelola dengan tertib, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang telah berlaku, efektif dan efisien, transparans dan bertanggungjawab menurut azas keadilan dan kepatutan. Pemerintah daerah sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan (PP RI No 8 Tahun 2006), berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerahnya secara akuntabel ke dalam laporan keuangan. Untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas serta kepercayaan para pengguna laporan maka laporan keuangan tersebut perlu diaudit oleh BPK RI, Hasil audit BPK RI berupa opini audit menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 158/PMK.02/2014 menjadi acuan kementerian keuangan dalam menilai capaian kinerja pemerintah daerah dan pedoman dalam pemberian reward dan punishment kepada pemerintah daerah terkait pengelolaan keuangannya.

Fenomena yang menjadi perhatian serius pemerintah yaitu masih banyaknya laporan keuangan pemerintah daerah yang belum mendapatkan opini WTP. Kondisi tersebut mengindikasikan pemerintah daerah belum mampu mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerahnya secara akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku. Pengelolaan keuangan publik termasuk dalam rangka hukum dan organisasi untuk melakukan pengawasan terkait siklus anggaran, penyusunan anggaran, pengadaaan, monitoring, pelaporan serta

kontrol dari pihak internal audit. Kontrol merupakan peran dari APIP dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan (Szymanski 2007; Baltaci dan Yilmaz 2006).

Dalam rangka percepatan peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara melalui Inpres No. 4 Tahun 2011 yang dilanjutkan dengan Inpres No. 9 Tahun 2014 mengamanatkan untuk mempercepat peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara dengan melakukan pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, melalui intensifikasi dan efektifitas peran APIP serta penyelenggaraan SPIP dan koordinasi antar instansi dalam upaya preventif terhadap korupsi. Untuk menjalankan fungsi dan perannya tersebut APIP harus memiliki kapabilitas yang baik sehingga mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerah terutama dalam proses pertanggungjawaban laporan keuangan. Perka BPKP-1633/K/JF/2011, Peningkatan kapabilitas APIP merupakan usaha untuk semakin memperkuat dan meningkatkan struktur kelembagaan, proses pelaksanaan manajemen maupun bisnis serta peningkatan sumber daya manusia APIP agar mampu menjalankan peran serta fungsi APIP secara efektif. Semakin baik kapabilitas APIP dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah maka pemerintah daerah semakin bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan daerahnya sehingga menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel.

Selain akuntabilitas, transparansi dalam pengelolaan keuangan negara/daerah menjadi salah satu hal yang penting untuk mencapai *Good governance and Clean Government* dalam mendukung pencapaian opini WTP. Menurut PP 24 tahun 2005, Transparansi yang dimaksud yaitu bahwa publik dapat mengetahui, serta mendapatkan informasi terkait proses penyelenggaraan pemerintah, pertanggungjawaban pemerintah terkait pengelolaan keuangan daerah serta sumber daya dan tingkat kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Salah satu bentuk transparansi pemerintah daerah dalam pemberian serta pengelolaan informasi secara efektif dan

efisien yaitu dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan *e-government*.

Inpres RI No. 3 Tahun 2003 menyatakan bahwa dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi dalam kegiatan pemerintahan (*e-government*) maka akan semakin mendukung dan meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Untuk mencapai tujuan pemerintahan tersebut maka diperlukan kebijakan, strategi pengembangan *e-government*. Menurut pendapat Pérez *et al.* (2008) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa untuk menuju *e-government*, pengungkapan informasi keuangan pada sektor publik menjadi faktor penting dalam meningkatkan transparansi. pengungkapan informasi keuangan secara *online*, menjadikan persyaratan akuntabilitas publik terpenuhi secara efisien dan efektif. Dengan demikian keberadaan *e-government* membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi serta pertanggungjawaban pemerintah terkait pengelolaan keuangan negara dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel, sehingga akan mempengaruhi pemberian opini audit BPK RI.

Pemberian opini audit BPK RI tidak hanya berdasarkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah, namun ada elemen lain yang terkait yaitu penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK RI atas temuan audit. Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara, pasal 21 ayat (1), rekomendasi harus ditindaklanjuti oleh setiap Entitas audit dan opini yang diberikan menjadi acuan untuk perbaikan di tahun berikutnya. Undang-Undang No. 15 Tahun 2006, memberikan amanat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memberikan rekomendasi evaluatif, penilaian opini, dan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaannya. Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan menjadi mutlak untuk segera dilaksanakan oleh entitas audit sebagai bentuk *feedback*/umpan balik atas pelaksanaan audit serta sebagai

langkah awal dalam rangka pengelolaan keuangan negara/daerah yang transparan dan akuntabel, semakin sedikit temuan audit yang diperoleh BPK RI maka semakin besarlah peluang daerah untuk mendapatkan Opini WTP.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

E-government dan opini Audit BPK atas LKPD

E-government merupakan proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan secara lebih efisien (Sosiawan 2008). Hamidah (2015) dalam penelitiannya menyampaikan, *e-government* merupakan suatu upaya pemerintah dalam memanfaatkan teknologi informasi aplikasi internet yang berbasis *web*, peningkatan kualitas pelayanan publik serta penyediaan akses yang mudah bagi publik sehingga memudahkan proses transformasi dari pejabat publik kepada masyarakat umum. Instruksi Presiden No. 6/2001 menyatakan bahwa dalam rangka mendukung pencapaian *good governance* dan percepatan demokrasi, aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika.

Pengembangan *e-government* secara tepat sesuai dengan Inpres No. 3 tahun 2003, diharapkan dapat mendukung proses penyelenggaraan pemerintah daerah, memperbaiki kualitas dan pemberian pelayanan yang efektif dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga pemerintah daerah dapat mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintahannya secara akuntabel. Semakin baik pemerintah daerah dalam menerapkan dan mengembangkan *e-government* dengan tepat dan *continue* maka proses pertanggungjawaban pemerintah daerah akan semakin akuntabel sehingga menjadi pertimbangan bagi BPK RI dalam memberikan opini audit yang lebih atas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan penjelasan di atas, hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut ini.

H1: Pelaksanaan *e-government* ber-

pengaruh signifikan positif terhadap opini audit BPK RI.

Kapabilitas APIP dan opini Audit BPK atas LKPD

Kapabilitas APIP merupakan kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang mencakup kapasitas, kewenangan, kompetensi SDM APIP yang antara satu dengan yang lain saling terkait dan harus dimiliki oleh APIP dalam mewujudkan peran APIP yang efektif (Perka BPKP, Per-1633/K/JF/2011). Dalam rangka peningkatan kapabilitas APIP pemerintah dalam *Grand desigmya* memaparkan mengenai rencana pemerintah untuk meningkatkan kapabilitas APIP yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019, dengan menargetkan kapabilitas APIP pada tahun 2019 untuk berada pada *level-3* dari skor *level 1-5* sesuai kriteria penilaian internasional (Perka BPKP No 6, 2015).

Tingkat kapabilitas APIP yang semakin tinggi dari *level 1* menjadi *level 3* atau 5 maka akan membantu pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang akuntabel. Pengelolaan keuangan yang akuntabel menjadikan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi akuntabel sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga menjadi pertimbangan BPK RI dalam memberikan opini. Pemberian opini kepada pemerintah daerah bergantung pada kualitas laporan keuangannya. Hal itu juga karena adanya peran APIP dalam tugas Pengawasannya yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas LKPD (Purba 2014). Berdasarkan penjelasan di atas, hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut ini.

H2: Kapabilitas APIP (Inspektorat Daerah) berpengaruh signifikan positif terhadap Opini audit BPK RI

Persentasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil audit BPK RI dan opini Audit BPK atas LKPD

Penyelesaian tindak lanjut atas hasil pemeriksaan atau audit BPK RI merupakan langkah yang harus dilakukan oleh pihak yang diaudit (Audite) untuk menyelesaikan

tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI terhadap temuan pada waktu pemeriksaan yang tercantum dalam LHP BPK RI. Proses tindak lanjut hasil audit BPK merupakan amanat dari Undang-undang No 33 tahun 2004 yang menyangkut aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara/daerah, dimana seluruh informasi keuangan negara/daerah adalah informasi terbuka yang bisa diakses oleh publik. Dengan demikian transparansi dan akuntabilitas keuangan negara/daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah terkait dengan pengelolaan keuangan negara/daerah kepada publik yang dengan mudah diakses oleh publik. Sehingga seluruh temuan hasil audit BPK RI harus segera ditindaklanjuti demi mendukung tercapainya opini WTP dari BPK RI.

Menurut Hartanto (2015) dari hasil pengujian hipotesisnya menunjukkan bahwa tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap opini tahun berikutnya. Dalam penelitian lain (Setyaningrum *et al.* 2014) menyampaikan bahwa dengan semakin banyak rekomendasi audit yang ditindaklanjuti, diharapkan akan semakin baik dan akuntabel kualitas laporan keuangan pemerintah, hal tersebut ditunjukkan dengan jumlah temuan audit BPK RI yang semakin berkurang. Masyitoh (2015) berpendapat bahwa salah satu usaha pemerintah daerah untuk memperbaiki proses penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kualitas pelaporan keuangan dengan menyelesaikan tindaklanjut rekomendasi hasil audit BPK RI.

Kondisi yang seperti ini tidak lepas dari peran serta APIP dalam hal pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah, dengan demikian pemerintah daerah mempunyai komitmen yang kuat untuk dapat menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan yang berdampak pada temuan audit BPK RI yang semakin berkurang pada periode selanjutnya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat penyelesaian hasil pemeriksaan BPK RI oleh suatu entitas maka akan menjadi pertimbangan bagi BPK RI untuk memberikan opini yang lebih baik pada tahun

selanjutnya. Berdasarkan penjelasan di atas, hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut ini.

H3: Persentasi penyelesaian tindak lanjut hasil audit BPK RI berpengaruh signifikan positif terhadap pemberian Opini audit BPK RI

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh Pemerintah Daerah/ Kabupaten/ Kota di Indonesia yang telah diaudit oleh BPK RI tahun 2014-2015.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan bersumber dari data sekunder Hasil penyelesaian tindak lanjut tahun 2014 dan opini audit BPK RI yang terdapat dalam IHPS BPK RI tahun 2015, Hasil *assessment* Kapabilitas APIP dan penerapan *e-government* Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Indonesia dari PeGi dan IACM.

Definisi Operasional dan Pengukuran

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Opini audit BPK RI (Y), sedangkan Variabel independen dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan *e-government* (X1), Kapabilitas APIP (X2), Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil audit BPK RI (X3).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dari 228 pemerintah daerah sebagai sampel, hanya 177 pemerintah daerah yang memenuhi syarat untuk analisis penelitian. Model Regresi yang terbentuk berdasarkan nilai estimasi parameter dalam variabels in the equation sebagai berikut: Opini Audit BPK RI = 2.083 + 0,469X1 + 0,128X2 + 0,013X3 + e

Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 1. Uji F menunjukkan bahwa secara bersama Opini Audit BPK RI dipengaruhi oleh variabel pelaksanaan *e-government*, kapabilitas APIP, persentase penyelesaian tindak lanjut hasil audit BPK RI. Uji signif-

Tabel 1
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstd Coef.	Std. Coef	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta	
1 (Constant)	2.083	.339		6.147 .000
P E-GOV	.469	.099	.324	4.761 .000
KAP (IACM)	.128	.243	.035	.525 .600
PPTL	.013	.002	.394	5.802 .000
<i>R-squared</i>				.222
<i>Adj. R-squared</i>				.209
<i>Sig. (F-statistic)</i>				.000

ikansi t dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen yaitu Kapabilitas APIP yang diukur dalam IACM secara penilaian individu tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen opini audit BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah namun secara penilaian bersama berpengaruh terhadap pemberian opini BPK RI. Variabel independen lain yaitu pelaksanaan *e-government* dan persentase penyelesaian tindak lanjut BPK RI signifikan positif mempengaruhi pemberian opini audit BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah.

Uji Koefisien determinasi (*Adjusted R²*) menunjukkan bahwa variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari pelaksanaan *e-government*, kapabilitas APIP (IACM), persentase penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI mampu menjelaskan keberadaan variabel dependen yaitu opini audit BPK RI sebesar 20,9%, sedangkan sisanya sebesar 79,1% dijelaskan oleh variabel lain yang ada diluar model penelitian.

Penerapan *e-government* terhadap Opini audit BPK RI.

E-government merupakan proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan secara lebih efisien (Sosiawan 2008). Lallana *et al.* (2002) dalam

penelitiannya menyampaikan *e-government* mengacu pada penggunaan informasi dan komunikasi *technologies* (ICT) oleh pemerintah daerah yang berguna untuk transformasi hubungan baik dengan warga masyarakat, para pebisnis, pegawai pemerintah dalam pemberian pelayanan dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah.

Dalam penelitiannya Purwanto (2007) berpendapat bahwa penggunaan portal *World Wide Web* (WWW) untuk menciptakan layanan satu atap (*one-stop shops*) adalah pendekatan *e-government* yang paling umum untuk memperbaiki penyediaan layanan publik kepada masyarakat. Masyarakat dilayani secara langsung melalui *web* sebagai *front office*, yang didukung oleh sistem informasi yang ada, sementara Perez (2008) mengungkapkan bahwa untuk menuju *e-government*, pengungkapan informasi keuangan pada sektor publik menjadi faktor penting untuk meningkatkan transparansi. Pengungkapan informasi keuangan secara *online*, menjadikan persyaratan akuntabilitas publik dapat dipenuhi secara efisien dan efektif, dengan demikian laporan keuangan yang terpublikasi ke publik diyakini kebenarannya oleh BPK RI dan menjadi bahan pertimbangan lanjutan terhadap opini selanjutnya.

Pada tabel 1 menunjukkan bahwa pelaksanaan *e-government* berpengaruh signifikan positif terhadap pemberian opini audit BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang peneliti ajukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin baik pemerintah daerah dalam menerapkan atau melaksanakan dan mengembangkan *e-government* dengan tepat maka akan mempengaruhi pemberian opini audit BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerahnya.

Hasil penelitian ini tidak jauh berbeda dengan kondisi real yang terjadi sekarang bahwa semakin banyak pemerintah daerah yang berhasil melaksanakan dan mengembangkan *e-government* dengan baik, mampu mendapatkan opini yang lebih baik dari BPK RI atas laporan keuangan pemerintah

daerah yang diaudit. Semakin baik pemerintah daerah dalam menerapkan dan mengembangkan *e-government* baik itu pada tataran kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan akan membantu pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya kepada publik, sehingga menjadi bahan pertimbangan bagi BPK RI untuk memberikan opini yang lebih baik atas pertanggungjawaban pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang berhasil mengembangkan *e-government* dan mendapat opini yang baik selain pemerintah daerah Kota Surabaya yaitu: Kota Pekalongan dengan nilai *e-government* sebesar 3,62 dengan predikat sangat baik, Kota Malang dengan nilai *e-government* sebesar 3,32 dengan predikat baik, Kabupaten Bojonegoro dengan nilai *e-government* sebesar 3,15 dengan predikat baik, dimana ketiga daerah tersebut masing-masing mendapatkan opini WTP DPP dalam laporan keuangan daerahnya.

Kapabilitas (APIP) Inspektorat daerah terhadap opini audit BPK

Kapabilitas APIP merupakan kemampuan untuk melaksanakan tugas - tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif (Per - 1633 /K/JF/2011). APIP dengan kapabilitas level 3 (*Integrated*) sesuai dengan Perka BPKP No 6 Tahun 2015, diharapkan telah menetapkan praktek profesional audit internal secara seragam dan selaras dengan standar audit. *out come* level 3, APIP melakukan performance audit/value for money audit yang dapat meningkatkan kinerja serta memberikan *advisory services* untuk perbaikan *governance process risk management control*.

Peningkatan kapabilitas APIP dari level 1 menjadi level 3 yang menjadi keinginan pemerintah menjadi keseriusan bagi APIP untuk meningkatkan kapabilitasnya dalam hal pengawasan secara optimal. Semakin tinggi tingkat kapabilitas APIP maka akan mampu mendukung pemerintah dae-

rah dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara/daerah yang akuntabel. Pengelolaan keuangan yang akuntabel menjadi bahan pertimbangan BPK RI dalam pemberian opini audit. Dalam penelitian yang dilakukan Purba (2014) menyampaikan, bahwa pemberian opini yang diperoleh setiap pemerintah daerah bergantung pada kualitas laporan keuangan dan karena adanya peran APIP dalam tugas pengawasannya yang diharapkan semakin meningkatkan kualitas LKPD. APIP diharapkan dengan kapabilitas yang dimilikinya mampu menjadi *agen of change* untuk perwujudan *good governance*.

Pada tabel 1 memperlihatkan bahwa variabel Kapabilitas APIP tidak signifikan dan berpengaruh positif terhadap pemberian opini audit BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa H2 yang peneliti ajukan dalam penelitian ini ditolak. Ditolaknya hipotesis peneliti dengan hasil penelitian karena berdasarkan fakta dan data di lapangan, level kapabilitas (APIP) Inspektorat daerah rata - rata masih berada di level 1 dan 2. Hal ini menandakan bahwa keterbatasan jumlah aparat Inspektorat, tingkat kompetensi dan luasnya cakupan pemeriksaan masih menjadi kendala untuk dapat memeriksa seluruh pos keuangan secara cermat dan mendetail, sehingga kinerja audit intern menjadi kurang optimal. Hasil pengujian hipotesis ini sejalan dengan pendapat Syarifudin (2014) bahwa kemampuan audit intern dalam mendeteksi ketidakpatuhan, kesalahan/ penyimpangan belum optimal. Oleh karenanya kesalahan dalam kegiatan maupun dalam pencatatan akuntansi yang telah dilakukan tidak terdeteksi hingga saat pemeriksaan oleh BPK.

Menurut Abubakar (2013), ada lima hal penyebab rendahnya kapabilitas APIP yaitu: lemahnya Independensi dan objektivitas APIP; tidak terpenuhinya kebutuhan formasi auditor; kurangnya alokasi anggaran belanja APIP dibandingkan dengan total belanja dalam APBN/APBD; organisasi profesi Auditor belum terbentuk sehingga standar audit, kode etik, dan *peer review* belum sepenuhnya tersedia; dan struktur organisasi dan pola hubungan kerja belum

sepenuhnya sesuai. Christian dan Sutaryo (2015) dalam penelitiannya, mengemukakan bahwa dengan hasil *assessment* kapabilitas APIP inspektorat daerah yang sebagian besar masih berada pada level 1 (*initial*), sehingga APIP belum dapat memberikan jaminan atas proses tata kelola sesuai peraturan, belum dapat mencegah korupsi dan hanya melakukan audit untuk keakuratan dan kepatuhan serta pengawasan oleh inspektorat daerah belum berjalan efektif sehingga belum mampu mengarahkan pelaksanaan pemerintah daerah dari kemungkinan penyimpangan.

Persentasi penyelesaian tindak lanjut hasil audit BPK RI terhadap opini audit BPK RI.

Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI merupakan suatu kegiatan yang dilakukan sebagai upaya perbaikan berkelanjutan terhadap kinerja entitas audit yang terdeteksi oleh BPK RI mengalami kelemahan dalam internalnya. Setyaningrum *et al.* (2014) dalam penelitiannya menyampaikan bahwa semakin banyak rekomendasi audit yang ditindaklanjuti oleh entitas audit maka semakin baik dan akuntabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, hal tersebut ditunjukkan dengan semakin berkurangnya jumlah temuan audit BPK RI, dengan demikian maka akan mempengaruhi pertimbangan opini BPK RI tahun berikutnya. Pada tabel 1 menunjukkan bahwa persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK RI berpengaruh secara signifikan positif terhadap pemberian opini audit BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang telah dibuat oleh peneliti. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa semakin besar atau tinggi persentase tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil audit BPK RI maka akan mempengaruhi pemberian opini audit BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah pada tahun selanjutnya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Winanti (2014) dan Setyaningrum (2015)

yang menemukan bahwa tindak lanjut hasil pemeriksaan berpengaruh positif terhadap opini audit. Semakin banyak tindak lanjut pemeriksaan yang dilakukan maka pengelolaan keuangan yang dilakukan pemda menjadi semakin baik sehingga opini yang diperoleh pada periode selanjutnya semakin baik. Hal yang sama disampaikan Sari *et al.* (2015) Tindak lanjut hasil pemeriksaan pada periode lalu berpengaruh positif terhadap opini audit melalui tingkat pengungkapan laporan keuangan K/L. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hartanto (2015) bahwa tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap opini audit tahun berikutnya. Hasil penelitian ini sesuai dengan pernyataan dan pedoman pemeriksaan BPK RI terhadap pemberian opini audit, dimana pemberian opini audit berdasarkan hasil penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan BPK RI.

SIMPULAN DAN IMPLIKASI

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pelaksanaan *e-government*, persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil audit BPK RI berpengaruh signifikan positif terhadap pemberian opini audit BPK RI atas LKPD, sedangkan variabel kapabilitas APIP menunjukkan tidak signifikan dan berpengaruh positif dalam pemberian opini audit BPK RI. Tidak signifikannya Kapabilitas APIP disebabkan karena berdasarkan fakta dan data di lapangan bahwa level kapabilitas (APIP) rata - rata masih berada di level 1 dan 2 menandakan bahwa keterbatasan jumlah aparat Inspektorat, tingkat kompetensi dan luasnya cakupan pemeriksaan masih menjadi kendala untuk dapat memeriksa seluruh pos keuangan secara cermat dan mendetail, sehingga kinerja audit intern menjadi kurang optimal.

Implikasi menunjukkan bahwa opini audit menjadi point utama dalam mengukur efektifitas pengawasan, penilaian akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. opini audit BPK RI menjadi *reflection* dari kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah, sehingga

ga opini tersebut menjadi acuan pertimbangan pemerintah pusat dalam menilai kinerja pemerintah daerah.

KETERBATASAN DAN SARAN

Penelitian ini dilakukan dengan keterbatasan yaitu: Data Kapabilitas APIP dari IACM dengan nilai terpublis per 31 Desember 2013/januari 2014, sehingga data yang digunakan kurang *up-date*, penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel independen sehingga cakupan penelitian tidak dapat meluas untuk mengetahui faktor-faktor signifikan lainnya yang memberikan pengaruh terhadap pemberian opini audit BPK RI atas LKPD. Diharapkan adanya kerjasama yang baik dari berbagai pihak terkait dengan opini audit BPK RI atas LKPD. Penelitian kedepan diharapkan menambahkan variabel lain dan menggunakan data yang lebih *update* sehingga menghasilkan hasil pengujian yang berkualitas serta memperluas cakupan solusi pemerintah daerah dalam mendapatkan opini yang lebih baik pada tahun selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2015. *Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2015*.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2011. Perka BPKP Nomor: Per - 1633 /K/Jf/2011 Tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2013. *Mengukur Kompetensi APIP dengan model IACM*. Warta Pengawasan. Vol XX, No.3, September 2013.
- Baltaci, M. dan S. Yilmaz. 2006. *Keeping An Eye On Sub National Governments: Internal Control And Audit At Local Levels*. Working Paper, World Bank Publications, Washington DC.
- Christian, Y. dan Sutaryo. 2015. Penentu Jumlah Internal Control Compliance Comment dan Pengaruhnya terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, 11 (2): 138-146.
- Hamidah, N. R. 2015. *Implementasi E-*

- government dalam Pelayanan (Studi Kasus Penerapan Program Siakad Di STAIN Ponorogo)*. Tesis, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Hartanto, R. 2015. *Analisis Penyelesaian Tindak Lanjut BPK RI (Prespektif Karakteristik Auditee, Karakteristik Auditor BPK, Karakteristik Eksekutif Dan Karakteristik Legislative Daerah)*. Tesis, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Lallana. E.C., P. J. Pascual dan E. S. Soriano. 2002. *E-government in the philippines: Benchmarking Against Global Best Practices. Feature Information technology kasarinlan*, 17(2): 235-272.
- LAN dan BPKP, 2000. *Akuntabilitas dan Good governance*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Masyitoh, R. D. 2015. *Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit, dan Tindak Lanjut Hasil Audit Terhadap Persepsi Korupsi pada Pemerintah Daerah Tingkat II Tahun 2008-2010*. Simposium Nasional Akuntansi XVIII, Medan, Indonesia..
- Menteri Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 158/PMK.02/2014 Tentang Tata Cara Penghargaan dan Pengenaan Sanksi atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.
- Osborne, D. dan T. Gaebler. 1992. *Reinventing Governance, How The Entrepreneurial Spirit Is Transforming The Publik Sektor*. New York: Penguins Book.
- Pérez, C. C., M. P. R. Bolívar dan A. M. L. Hernández. 2008. E-government Process And Incentives For Online Publik Financial Information. *Online Information Review*, 32 (3): 379 - 400.
- Purba, B. C. 2014. Opini dan Status Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan pada Pemerintah Daerah di Kalimantan Barat, Tengah, dan Timur. *Jurnal Akuntansi*, 18(03): 384-407.
- Purwanto, A. 2007. *Rancangan dan implementasi model pemeriksaan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas aplikasi e-government di pemerintah daerah: studi kasus kabupaten sragen*. Tesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Republik Indonesia. Inpres Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-government.
- Republik Indonesia. Inpres No 4 Tahun 2011. Tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara.
- Republik Indonesia. Inpres No. 6/2001 Tgl. 24 April 2001 Tentang Pengembangan Dan Pendayagunaan Telematika Di Indonesia.
- Republik Indonesia. Inpres No 9 Tahun 2014. Tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern Dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000. Tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan & Tanggungjawab Keuangan Negara.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
- Sari, P., D. Martani dan D. Setyaningrum. 2015. *Pengaruh Temuan Audit, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Opini Audit melalui Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga*. Simposium Nasional Akuntansi XVIII, Medan, Indonesia.
- Setyaningrum, D. 2015. *Kualitas Auditor, Pengawasan Legislatif dan Pemanfaatan Hasil Audit dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*. Disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Setyaningrum, D., L. Gani dan D. Martani. 2014. *Pengaruh Kualitas Auditor dan Pengawasan Legislatif Terhadap Temuan Audit dengan Tindak Lanjut*

- Rekomendasi Hasil Pemeriksaan sebagai Variabel Intervening*. Simposium Nasional Akuntansi XVII, Mataram, Indonesia.
- Sosiawan, E. A. 2008. *Evaluasi Implementasi E-government Pada Situs Web Pemerintah Daerah Di Indonesia*. Seminar Nasional Informatika UPN (Veteran), Yogyakarta, 24 Mei 2008. Yogyakarta.
- Syarifudin, A. 2014. Pengaruh Kompetensi SDM dan Peran Audit Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (studi empiris pada Pemkab Kebumen). *Jurnal Fokus Bisnis*, 14(02): 26-44.
- Szymanski, S. 2007. *How To Implement Economic Reforms: How To Fight Corruption Effectively In Publik Procurement In See Countries*. Paris: Oecd Publication.
- Winanti, B. A. 2014. *Analisis Pengaruh Temuan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK, Legitimasi Kepala Daerah serta Pengawasan Pemerintahan terhadap Opini Audit LKPD 2010-2011*. Skripsi, FE Universitas Indonesia, Depok, Indonesia.